



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja Dinas Perhubungan dalam Tahun 2025, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan dan merupakan realisasi capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan diterbitkannya LAKIP Tahun 2025, diharapkan Dinas Perhubungan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga pihak-pihak berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pangkalpinang, Februari 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

M. HARIS AR, AP, M.H
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 19760620 199502 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatkan Akutabilitas Perangkat Daerah”:
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Formulasi Perhitungan
Formulasi Pengukuran :
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 77; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 77,75. Dengan demikian capaian ini melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)”:
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Formulasi Perhitungan :

Formulasi Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terbangun (tahun n)}}{\text{Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) selama 5 tahun}} \times 100\%$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 23,21%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 20,25%. Dengan demikian capaian ini belum melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 91,53%.

3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran”:

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan, Formulasi Perhitungan :

Formulasi Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan terbangun (tahun n)}}{\text{Jumlah rencana Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan selama 5 tahun}} \times 100\%$$

- b. Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan, Formulasi Perhitungan :

Formulasi Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Rute Pelayaran yang terfasilitasi terbangun (tahun n)}}{\text{Jumlah Rute Pelayaran yang terfasilitasi selama 5 tahun}} \times 100\%$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Pengelolaan Pelayaran
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 26,28%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 26,28%. Dengan demikian capaian ini mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan terutama Lampu Penerangan Jalan Umum sangat banyak.
2. Pembebasan lahan / hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang membutuhkan waktu yang lama.

3. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga alokasi penyusunan dokumen dan pembangunan fisik pelabuhan dibagi menjadi beberapa tahapan

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	2
Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur	2
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	3
1.3 Isu-isu Strategis	3
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	4
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	11
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	12
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2025	13
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	23
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2025	25
3.3. Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	35

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	4
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	8
Tabel I.3	Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025	10
Tabel II.1	Sasaran Strategis PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	12
Tabel II.3.1	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	13
Tabel II.3.2	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	20
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kepala PD Dinas Perhubungan Tahun 2025	21
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2025	24
Tabel III.3	Pengukuran Capaian Sasaran	25
Tabel III.4	Target dan Realisasi Kinerja	26
Tabel III.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025	31

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja	2
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3
Gambar II.1. Sistem Integrasi DPA, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP 2025	
Gambar II.2. Website PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3
Gambar II.3. Layanan Pengaduan Melalui Website PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3

Pendahuluan

Bab I berisi :

*Cascading Kinerja
Mandat Kinerja, Peta
Proses Bisnis dan
Struktur Organisasi
Tugas, Fungsi dan Peta
Jabatan
Isu-Isu Strategis
Dukungan SDM,
Sarana-Prasarana dan
Anggaran*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

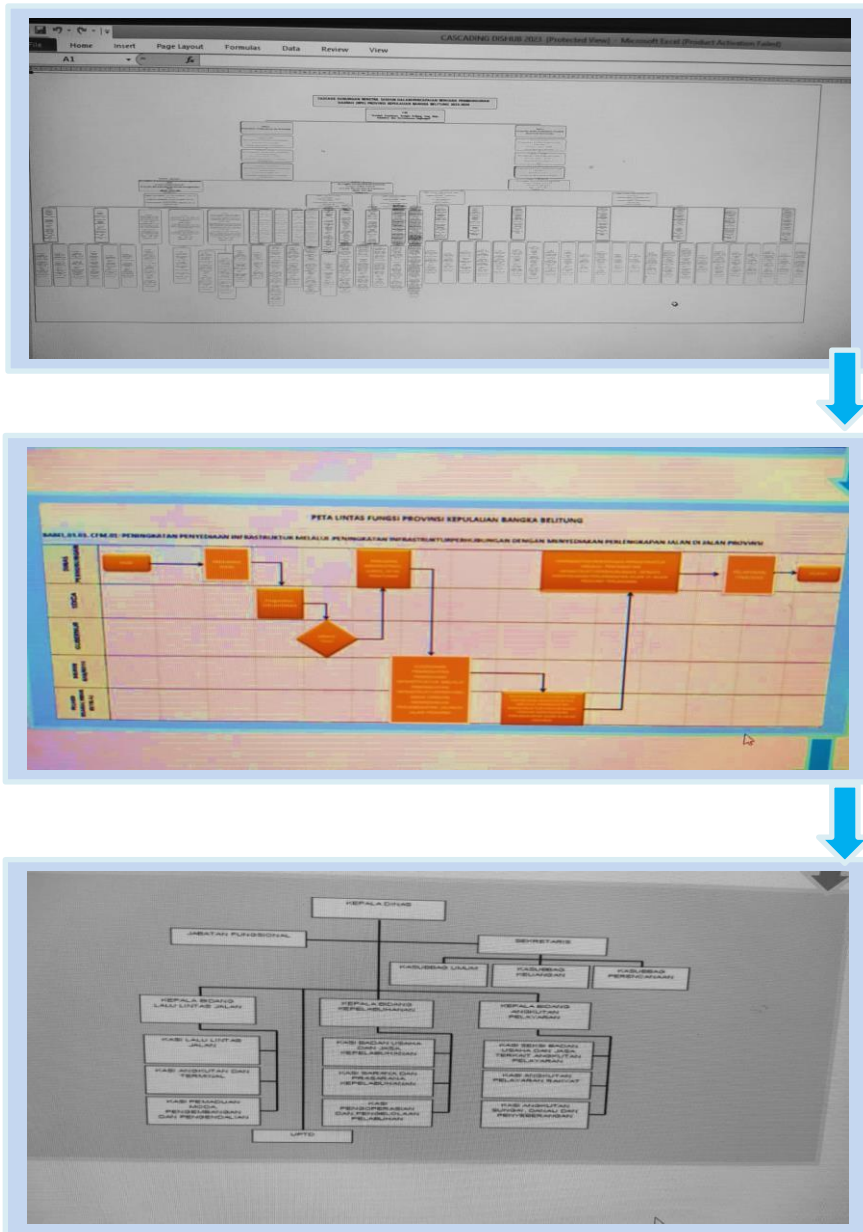
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri E) dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD Dinas Perhubungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang non Pelayanan Dasar. Adapun PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubungan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.



PETA JABATAN	
Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
Jabatan Struktural : Esselon II : 1 Esselon III : 4 Esselon IV : 9 Jabatan Fungsional : 3 Jabatan Fungsional Tertentu : -	Jabatan Pelaksana : 80

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi PD Dinas

Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur”, antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya penggunaan teknologi informasi untuk pengidentifikasian capaian dan progres kinerja;
2. Rendahnya disiplin berlalu lintas pengguna jalan, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan dan kecelakaan pada ruas jalan pusat-pusat ekonomi;
3. Jumlah kecelakaan dan pelanggaran yang masih tinggi yang diakibatkan oleh masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan serta pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan;
4. Belum optimalnya pembangunan konektivitas sektor perhubungan di pulau-pulau berpenduduk sehingga belum mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH	
		S3		S2		S1		NON S1			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
JPT	PRATAMA (Eselon II)			1						1	
ADMINISTRASI	ADMINISTRATOR (Eselon III)			1		2				3	
	PENGAWAS (Eselon IV)			4	1	2	2			9	
	PELAKSANA										
	1	Penata Laporan Keuangan						3			3
	2	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana					1				1
	3	Bendahara						1			1

KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
		S3		S2		S1		NON S1		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
4	Pengadministrasi Umum							3		3
5	Pengelola Data							1		1
6	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				1	1				2
7	Pengelola Program dan Kegiatan							1		1
8	Pengadministrasi Perkantoran							5		5
9	Penyusun Laporan Hasil Diklat				1					1
10	Pengawas Lalu Lintas					3				3
11	Analisis Pelabuhan					2	1			3
12	Analisis Perizinan Transportasi						2			2
13	Analisis Lalu Lintas			1		1				2
14	Analisis Teknik Survey Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					1				1
15	Analisis Pelayaran					2				2
16	Pengawas Pelabuhan					1	1			2
17	Pengawas Transportasi					1				1
18	Pengelola Perizinan							1		1
19	Pengelola Pengawasan LLAJ							1		1
20	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas							2		2
21	Pengawas Keselamatan Darat					1				1
22	Pemeriksa Lalu Lintas Darat					2				2

KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN		TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
			S3		S2		S1		NON S1		
			L	P	L	P	L	P	L	P	
23	Pengawas Keselamatan Angkutan					1					1
24	Penyusun Kinerja Jaringan Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			1		2					3
25	Pemeriksa Pelabuhan					1					1
26	Analisis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat					1	2				3
27	Pemeriksa Keselamatan Darat					1					1
28	Pengawas Angkutan dan Terminal					2					2
29	Analisis Angkutan Darat						1				1
30	Analisis Rencana Umum Pemanduan Moda Transportasi Darat						1				1
31	Pengadministrasi Kecelakaan LLAJ							2			2
32	Penyusun Teknis Izin Operasi Pelabuhan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan					1					1
33	Pengadministrasi Kinerja Operasional Pelabuhan, Sungai, Danau,							1			1

KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN		TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH	
			S3		S2		S1		NON S1			
			L	P	L	P	L	P	L	P		
		dan Penyeberangan										
	34	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana					1					1
	35	Pengelola Sarana Angkutan						1				1
	36	Pengelola Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Sungai, Danau, dan Penyeberangan								1		1
	37	Pengadministrasi LLAJ								2		2
	38	Teknisi Survey Jaringan Transportasi								1		1
	39	Pengelola Perizinan Angkutan Jalan								1		1
	40	Penata Layanan Operasional					1					1
	41	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan								1	1	2
	42	Pengawas Transportasi Darat					3					3
	43	Petugas Transportasi Darat								2	1	3
	44	Tenaga Pelayanan Umum								5	2	7
FUNGSIONAL	1	Analisis Kebijakan Ahli Muda					2	1				3
JUMLAH			0	0	8	3	36	16	30	4		97

Memperhatikan kondisi pegawai seperti tersebut di atas, berdasarkan jumlah dan tingkat pendidikan yang dimiliki, maka secara umum dapat disimpulkan sementara bahwa sumber daya aparatur Dinas Perhubungan sudah cukup memadai dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

NO	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	TANAH	4	Rp61.737.396,00
	TANAH	4	Rp61.737.396,00
2	PERALATAN DAN MESIN	10.381	Rp 93.728.550.796,81
	ALAT BESAR	8	Rp1.353.321.500,00
	ALAT ANGKUTAN	20	Rp3.323.358.250,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	46	Rp872.215.800,00
	ALAT PERTANIAN	0	0
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	650	Rp7.895.623.784,94
	ALAT STUDIO,KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	79	Rp541.496.800,00
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	3	Rp3.593.461.990,00
	ALAT LABORATORIUM	8	Rp30.585.000,00
	ALAT PERSENJATAAN	85	Rp27.140.000,00
	KOMPUTER	126	Rp842.741.000,00
	ALAT EKSPLORASI	0	0
	ALAT PENGEBORAN	0	0
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0
	ALAT KESELAMATAN KERJA	2	Rp13.330.200,00
	ALAT PERAGA	0	0
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0
	RAMBU–RAMBU	9354	Rp75.235.276.471,87
	PERALATAN OLAHRAGA	0	0
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	319	Rp33.986.864.360,45
	BANGUNAN GEDUNG	319	Rp33.986.864.360,45
	MONUMEN	0	0
	BANGUNAN MENARA	0	0

NO	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	469	Rp76.828.737.793,00
	JALAN DAN JEMBATAN	460	Rp74.594.529.000,00
	BANGUNAN AIR	4	Rp1.203.017.000,00
	INSTALASI	4	Rp1.016.266.793,00
	JARINGAN	1	Rp14.925.000,00
5	ASET TETAP LAINNYA	521	Rp765.186.000,00
	BAHAN PERPUSTAKAAN	516	Rp499.575.000,00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0	0
	HEWAN	0	0
	BIOTA PERAIRAN	0	0
	TANAMAN	0	0
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	5	Rp265.611.000,00
6	KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan	4	Rp668.915.381,00
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	4	Rp668.915.381,00
7	ASET LAINNYA	75	Rp8.089.769.803,00
	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
	ASET TIDAK BERWUJUD	10	Rp1.210.000.000,00
	ASET LAIN-LAIN	65	Rp.6.879.769.803,00
	TOTAL	11.773	Rp. 216.549.845.581,55

Kendaraan operasional PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 10 unit kendaraan operasional, 8 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Hanya saja sebanyak 20% dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak/mendukung*) tuntutan pekerjaan yang 80% berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2024	19.294.146.261	583.464.198	-	-	19.877.610.459
2025	18.481.344.789	5.611.450.100	-	-	24.092.794.889

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 dibanding tahun 2025 terdapat peningkatan anggaran belanja sebesar Rp 4.215.184.430 Hal ini menunjukkan ada peningkatan anggaran untuk membiayai program/kegiatan PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya untuk belanja infrastruktur Perhubungan.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Apresiasi
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/102/LHE-ITDA/ 2025 tanggal 28 April 2025 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Evaluasi Atas AKIP Tahun 2024 Dinas Perhubungan, Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan target dalam perencanaan kinerja yang dapat dicapai (Achievable), menantang, dan realistis; 2. Setiap unit/sasaran kinerja memahami dan peduli atas pengukuran kinerja; 3. Agar meningkatkan publikasi terkait laporan kinerja; 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memadai, dan; 5. Membuat dokumen laporan kinerja tersebut sesuai dengan standar yang ada. 	<p>Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat dan pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi Atas AKIP Tahun 2024.</p>

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

*Bab 2 Berisi :
Tujuan,
Sasaran dan
Indikator Kinerja OPD
Strategi dan Arah
Kebijakan
Struktur Program
dan Kegiatan Tahun
2024*

Renstra PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD 2023 - 2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 - 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan

Adapun sasaran PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan, 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra
					2023	2025	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	74	76	77	78	80	80
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	10	15,16	23,21	30,98	40	40
3	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelabuhan	%	5	13,35	26,28	37,65	60	60

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatkan, pemeliharaan Dan pembangunan sarana Prasarana perhubungan
3.	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Meningkatkan, pemeliharaan Dan pembangunan sarana Prasarana perhubungan Kepelabuhanan

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Perhubungan tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
1	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.288.994.225	14.412.034.899	1.876.959.326	
			1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.880.400	136.530.400	15.350.000
			1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.557.600	68.207.600	15.350.000
			2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.322.800	68.322.800	0
			2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.950.589.645	11.119.844.419	830.745.226
			1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.914.589.645	11.104.844.619	830.745.026
			2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.000.000	10.399.800	1.600.200
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	24.000.000	4.600.000	19.400.000
			3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	141.999.900	120.999.600	21.000.300
			1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.999.950	60.499.800	10.500.150

		2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.999.950	60.499.800	10.500.150
	4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	803.174.280	691.362.180	111.812.100
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.939.200	48.939.200	0
		2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	251.999.180	201.491.580	50.507.600
		3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.991.500	23.162.000	15.829.500
		4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	107.999.400	98.024.400	9.975.000
		5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	38.990.000	22.990.000	16.000.000
		6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.255.000	296.755.000	19.500.000
	5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	479.620.000	384.134.600	95.485.400
		1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	140.000.000	40.000.000
		2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	299.620.000	244.134.600	55.485.400
	6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.654.765.000	967.933.700	686.831.300
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	0

			2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	850.000.000	343.118.700	506.881.300
			3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	0	30.000.000
			4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	764.765.000	614.815.000	149.950.000
			7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.106.965.000	991.230.000	115.735.000
			1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.995.000	355.845.000	5.850.000
			2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	225.970.000	161.000.000	64.970.000
			3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	331.000.000	429.385.000	98.385.000
			4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	45.000.000	155.000.000
2	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8.951.864.900	8.083.076.290	868.788.610
			1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	8.399.959.750	7.691.646.800	708.312.950
			1	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6.399.959.750	5.416.246.800	983.712.950
			2	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.000.000.000	2.275.400.000	275.400.000

		2	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	260.999.790	190.696.790	70.303.000
		1	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	141.999.890	113.513.890	28.486.000
		2	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	118.999.900	77.182.900	41.817.000
		3	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	45.999.800	28.212.000	17.787.800
		1	Sub Kegiatan Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	45.999.800	28.212.000	17.787.800
		4	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	132.999.850	104.782.000	28.217.850
		1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	132.999.850	104.782.000	28.217.850
		5	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	55.952.900	33.869.350	22.083.550
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	55.952.900	33.869.350	22.083.550
		6	Kegiatan Penetapan Trif Kelas Ekonomi untuk angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah Provinsi	55.952.900	33.869.350	22.083.550

				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	55.952.900	33.869.350	22.083.550
3	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	3		Program Pengelolaan Pelayaran	2.229.831.350	1.597.683.700	632.147.650
		1		Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	195.990.850	69.050.350	126.940.500
		1		Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	49.994.250	25.832.250	24.162.000
		2		Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas	81.998.400	14.895.000	67.103.400
		3		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota	63.998.200	28.323.100	35.675.100
		2		Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	593.588.250	318.449.250	275.139.000

		1	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	475.619.800	245.500.000	230.119.800
		2	Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	117.968.450	72.949.250	45.019.200
		3	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	33.998.500	17.000.000	16.998.500
		1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	33.998.500	17.000.000	16.998.500
		4	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	44.000.000	22.000.000	22.000.000
		1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	44.000.000	22.000.000	22.000.000
		5	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1.017.504.900	933.445.400	84.059.500
		1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Regional	931.652.500	882.224.000	49.428.500

			2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Regional	59.938.000	37.770.000	22.168.000
			3	Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Regional	25.914.400	13.451.400	12.463.000
			6	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	87.862.100	53.323.100	34.539.000
			1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayaran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	27.957.200	13.723.100	14.234.100
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	59.904.900	39.600.000	20.304.900

			7	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	73.890.900	44.494.300	29.396.600
			2	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	73.890.900	44.494.300	29.396.600
			8	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	78.997.000	53.362.600	25.634.400
			1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	27.997.300	20.744.800	7.252.500

			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang , Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	50.999.700	32.617.800	18.381.900
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran					27.470.690.565	24.092.794.889	3.377.895.676

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.288.994.225	14.412.034.899	1.876.959.326
	Total Anggaran Pendukung	16.288.994.225	14.412.034.899	1.876.959.326

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala PD Dinas Perhubungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	Triwulan I	0
					Triwulan II	80
					Triwulan III	80
					Triwulan IV	80
2	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	30,98%	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	30,98%
3	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	%	37,65%	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	37,65%

Pada tahun 2025, PD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reuiu dilakukan karena adanya perubahan Dokumen RPJMD dan Renstra sehingga terjadi perubahan sasaran strategis, indikator beserta targetnya. Perjanjian Kinerja (Reuiu) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,42	Triwulan I	0
					Triwulan II	78,42
					Triwulan III	78,42
					Triwulan IV	78,42
		Skor Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	93	Triwulan I	0
					Triwulan II	93
					Triwulan III	93
					Triwulan IV	93
2.	Meningkatkan Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,4859	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	0,4859
3.	Menurunkan V/C Ratio di Jalan Provinsi	V/C Ratio	Nilai	0,19	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	0,19
4.	Meningkatkan Rasio Konektivitas Transportasi Laut	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	Nilai	0,50	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	0,50

Keterangan Tambahan:

1. **Penyesuaian indikator dan target kinerja tata kelola internal**, dengan penambahan indikator *Skor Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Internal* serta peningkatan target triwulanan Nilai SAKIP dibandingkan dokumen awal.
2. **Perubahan sasaran strategis bidang**, dari pemenuhan infrastruktur (LLAJ dan kepelabuhanan) menjadi indikator berbasis outcome, yaitu *Rasio Konektivitas Provinsi* dan *V/C Ratio di Jalan Provinsi*.
3. **Penyesuaian pola pencapaian target**, di mana sebagian indikator ditetapkan akumulatif dan difokuskan pada Triwulan IV sesuai dengan karakter pengukuran dan ketersediaan data evaluasi.

BAB 3

Bab 3 Berisi :
Capaian
Kinerja Tahun
2023

Realisasi
Anggaran
Inovasi
Lintas Sektor

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indikator: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Formula Perhitungan : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	78,10	78,42	-	100	Tinggi	80
2	Meningkatkan Rasio Konektivitas Provinsi	<u>Indikator:</u> Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)	Rasio	0,639	0,673	0,54	0,68	125,93	Tinggi	0,825

3	Menurunkan V/C Rasio	V/C Ratio di Jalan Provinsi = volume lalu lintas dibagi kapasitas jalan sebagai ukuran tingkat kejenuhan jaringan jalan provinsi	Nilai	0,19	0,19	0,19	0,19	100	Tinggi	1
4	Meningkatkan Rasio Konektivitas Transportasi Laut	Indikator: Rasio konektivitas laut = Pelabuhan yang telah dilayani Angkutan Laut dibagi Total Pelabuhan Laut yang digunakan untuk Angkutan Laut	Nilai	0,5	0,5	0,5	0,5	100	Tinggi	1

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Meningkatkan Rasio Konektivitas Provinsi

Kinerja sasaran Meningkatkan Rasio Konektivitas Provinsi diukur dengan indikator Rasio Konektivitas Provinsi, V/C Ratio di Jalan Provinsi, Rasio Konektivitas Laut.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)
		V/C Ratio di Jalan Provinsi	V/C Ratio di Jalan Provinsi = volume lalu lintas dibagi kapasitas jalan sebagai ukuran tingkat kejenuhan jaringan jalan provinsi
		Rasio Konektivitas Laut	Rasio konektivitas laut = Pelabuhan yang telah dilayani Angkutan Laut dibagi Total Pelabuhan Laut yang digunakan untuk Angkutan Laut

Kinerja sasaran Meningkatkan Rasio Konektivitas Provinsi diukur dengan indikator Rasio Konektivitas Provinsi, V/C Ratio di Jalan Provinsi, Rasio Konektivitas Laut.

Perhitungan Rasio Konektivitas Provinsi dilakukan menggunakan dua indikator, yaitu Rasio Konektivitas Darat (Angkutan Jalan) dan Rasio Konektivitas ASDP, dengan formulasi perhitungan adalah $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$, capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2025 adalah 0,68 dari target 0,54.

Perhitungan V/C Ratio di Jalan Provinsi menggunakan formulasi perhitungan volume lalu lintas dibagi kapasitas jalan sebagai ukuran tingkat kejenuhan jaringan jalan provinsi, capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2025 adalah 0,19 dari target 0.19.

Perhitungan Rasio Konektivitas Transportasi Laut menggunakan formulasi perhitungan Pelabuhan yang telah dilayani Angkutan Laut dibagi Total Pelabuhan Laut yang digunakan untuk Angkutan Laut, capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2025 adalah 0,5 dari target 0,5.

Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2025 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rasio Konektivitas Provinsi	0,673	0,54	0,68	125,93	0,585	125,93
2.	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,19	0,19	0,19	100	0,19	100
3.	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	0,5	0,5	0,5	100	0,5	100



Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

- a. Rasio Konektivitas Provinsi melampaui target tahun 2025 dengan capaian 125,93%, menunjukkan kinerja sangat baik dan telah melebihi target akhir Renstra 2026.
- b. V/C Ratio di Jalan Provinsi dan Rasio Konektivitas Transportasi Laut tercapai 100%, menunjukkan sasaran telah terpenuhi dan konsisten dengan target tahunan maupun Renstra.

Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<i>Rasio Konektivitas Provinsi</i>	0,54	0,68	125,93
2.	<i>V/C Ratio di Jalan Provinsi</i>	0,19	0,19	100
3.	<i>Rasio Konektivitas Transportasi Laut</i>	0,5	0,5	100

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p style="text-align: center;">Survei Kepuasan Layanan Transportasi Tahun Anggaran 2025</p>
2.		<p style="text-align: center;">Rehabilitasi Sarana bantu Navigasi Pelayaran Tahun 2025 di Wilayah Perairan Kepulauan Bangka Belitung</p>
3		<p style="text-align: center;">Rehabilitasi Perlengkapan Jalan</p>

4		Ramp Check
---	---	------------

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Adanya mekanisme Bantuan Teknis (Bantek) dalam penganggaran di Kementerian Perhubungan, sehingga kebutuhan prioritas Pemerintah Provinsi dapat diakomodir melalui APBN walaupun kebutuhan tersebut bukan kewenangan kementerian.
- b. Ketersediaan beberapa jenis Fasilitas Perlengkapan jalan dalam e-katalog Nasional maupun sektoral sehingga mempermudah proses pengadaan barang dan jasa.
- c. Penetapan Lintas berupa SPM Kapal, Penetapan Tarif berupa Posko dan Pengawasan di Pelabuhan Tanjung Sadai – Tanjung Ru, Tanjung Api Api – Tanjung Kalian, Tanjung Ru – Tanjung Nyato
- d. Proses penyusunan dokumen pembangunan Pelabuhan telah dipedomani bersama oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun kementerian.

Faktor Penghambat keberhasilan

- Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan terutama Lampu Penerangan Jalan Umum sangat banyak.
- Pembebasan lahan / hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang membutuhkan waktu yang lama.
- Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga alokasi penyusunan dokumen dan pembangunan fisik pelabuhan dibagi menjadi beberapa tahapan.

1.1 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	23,21 %	20,25%	91,53%	Rp 8.083.076.290	Rp 7.766.195.489	96,07 %	Rp. 316.880.801
2	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	26,28%	26,28%	100%	Rp 1.597.683.700	Rp. 567.894.945	35,54 %	Rp. 1.029.788.755
Jumlah						Rp. 9.680.759.990	Rp. 8.334.090.434	86,08 %	Rp. 1.346.669.556
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	-	-	Rp 14.412.034.899	Rp 12.424.360.733	86,20 %	Rp. 1.987.674.166
Total Belanja Langsung						Rp 24.092.794.889	Rp. 20.758.451.167	86,16%	Rp 3.334.343.722

Sumber: <http://SIPD>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD Dinas Perhubungan .Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2025, Laporan Keuangan PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 24.092.794.889 terealisasi Rp 20.758.451.167 atau 86,16 % sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 3.334.343.722 yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi sewa tempat
- Efisiensi biaya makanan dan minuman
- Tagging anggaran yang wajib dilaksanakan

1.2 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. SIPELTAN (Sistem Pelaporan dan Pencatatan) khusus untuk Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

Kesimpulan

Rekomendasi

Peningkatan kinerja

Hasil laporan kinerja PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan terutama Lampu Penerangan Jalan Umum sangat banyak.
2. Pembebasan lahan / hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang membutuhkan waktu yang lama.
3. Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga alokasi penyusunan dokumen dan pembangunan fisik pelabuhan dibagi menjadi beberapa tahapan.

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja PD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 adalah:

1. Adanya mekanisme Bantuan Teknis (Bantek) dalam penganggaran di Kementerian Perhubungan, sehingga kebutuhan prioritas Pemerintah Provinsi dapat diakomodir melalui APBN walaupun kebutuhan tersebut bukan kewenangan kementerian.
2. Ketersediaan beberapa jenis Fasilitas Perlengkapan jalan dalam e-katalog Nasional maupun sektoral sehingga mempermudah proses pengadaan barang dan jasa.
3. Penetapan Lintas berupa SPM Kapal, Penetapan Tarif berupa Posko dan Pengawasan di Pelabuhan Tanjung Sadai – Tanjung Ru, Tanjung Api Api – Tanjung Kalian, Tanjung Ru – Tanjung Nyato.
4. Proses penyusunan dokumen pembangunan Pelabuhan telah dipedomani bersama oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun kementerian.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan mekanisme pendanaan melalui Bantuan Teknis (Bantek) Kementerian Perhubungan.
2. Adanya komitmen bersama dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota terhadap percepatan pembangunan pelabuhan ,
3. Menyusun skala prioritas pembangunan dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran.

